

Katalog: 2303012.76



STATISTIK

Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Barat

2020



BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI BARAT



STATISTIK

Angkatan Kerja

Provinsi Sulawesi Barat

2020

Statistik Angkatan Kerja

Provinsi Sulawesi Barat

2020

ISSN: 2655-0334

Nomor Publikasi: 76000.2115

Katalog: 2303012.76

Ukuran Buku: 17,5 x 25 cm

Jumlah Halaman: x + 60 halaman

Naskah:

BPS Provinsi Sulawesi Barat

Penyunting:

BPS Provinsi Sulawesi Barat

Gambar Kulit:

BPS Provinsi Sulawesi Barat

Diterbitkan Oleh:

©BPS Provinsi Sulawesi Barat

Dicetak Oleh:

Erlangga Grafis

Sumber Ilustrasi:

Freepik.com

Unsplash.com

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan, dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersial tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

KATA PENGANTAR

“Statistik Angkatan Kerja Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020” merupakan publikasi yang membahas perkembangan kondisi angkatan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2020. Kondisi angkatan kerja yang dibahas dalam publikasi ini meliputi profil angkatan kerja, pekerja, dan pengangguran di Provinsi Sulawesi Barat ditinjau dari aspek wilayah desa/kota, kelompok umur, dan tingkat pendidikan.

Data dalam publikasi ini bersumber dari hasil Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilaksanakan pada bulan Agustus 2020, dimana Sakernas merupakan survei khusus yang dilaksanakan dua kali dalam setahun untuk menangkap kondisi ketenagakerjaan di Indonesia. Publikasi ini diharapkan dapat memenuhi kebutuhan konsumen data serta memperkaya informasi terkait kondisi angkatan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2020.

Selesaiannya publikasi ini tidak lepas dari peran berbagai pihak. Oleh karena itu, diucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan publikasi ini. Untuk perbaikan dan penyempurnaan pada publikasi berikutnya, saran dan masukan dari pembaca akan sangat berarti.

Mamuju, September 2021
Kepala Badan Pusat Statistik
Provinsi Sulawesi Barat



AGUS GEDE HENDRAYANA HERMAWAN.,S.E.,M.Si.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR LAMPIRAN	viii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	3
1.2. Penjelasan Umum	4
BAB 2 KETENAGAKERJAAN	11
2.1. Angkatan Kerja	13
2.2. Penduduk yang Bekerja	16
2.3. Lapangan Pekerjaan.....	18
2.4. Status Pekerjaan	20
2.5. Pekerja Paruh Waktu	24
2.6. Jumlah Jam Kerja	25
2.7. Pendidikan Pekerja	27
BAB 3 PENGANGGURAN DAN SETENGAH PENGANGGURAN	29
3.1. Pengangguran	31
3.2. Setengah Pengangguran.....	36
LAMPIRAN	39



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja dan Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja di Provinsi Sulawesi Barat, 2019 - 2020	14
Tabel 2.2.	Penduduk Usia Kerja, Penduduk yang Bekerja dan EPR di Provinsi Sulawesi Barat, 2019 - 2020	17
Tabel 2.3.	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan/Usaha Utama di Provinsi Sulawesi Barat, 2020	19
Tabel 2.4.	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Sulawesi Barat, 2020	21
Tabel 2.5.	Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja di Provinsi Sulawesi Barat, 2020	26
Tabel 3.1.	Jumlah Angkatan Kerja, Penganggur dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Sulawesi Barat, 2020	32
Tabel 3.2.	Indikator Pengangguran Umur Muda di Provinsi Sulawesi Barat, 2020	33
Tabel 3.3.	Indikator Setengah Pengangguran di Provinsi Sulawesi Barat, 2020	37



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Konsep Dasar Ketenagakerjaan	4
Gambar 2.1.	TPAK Menurut Kelompok Umur di Provinsi Sulawesi Barat, 2020	15
Gambar 2.2.	Persentase Pekerja Informal di Provinsi Sulawesi Barat, 2020.....	22
Gambar 2.3.	Persentase Pekerja Rentan (<i>Vulnerable Employment</i>) di Provinsi Sulawesi Barat, 2020.....	23
Gambar 2.4.	Persentase Pekerja Paruh Waktu di Provinsi Sulawesi Barat, 2020	24
Gambar 2.5.	Persentase Pekerja Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat, 2020	28
Gambar 3.1.	Persentase Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat, 2020	35
Gambar 3.2.	Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat, 2020	38

DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 1A.	Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan di Provinsi Sulawesi Barat, 2020	41
Tabel 1B.	Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan di Provinsi Sulawesi Barat, 2019 - 2020	42
Tabel 2A.	Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur di Provinsi Sulawesi Barat, 2020.....	43
Tabel 2B.	Jumlah Penduduk 15 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur di Provinsi Sulawesi Barat, 2019 - 2020	44
Tabel 3A.	Jumlah Angkatan Kerja Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur di Provinsi Sulawesi Barat, 2020	45
Tabel 3B.	Jumlah Angkatan Kerja Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Kelompok Umur di Provinsi Sulawesi Barat, 2019 - 2020 ..	46
Tabel 4A.	Jumlah Angkatan Kerja Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan di Provinsi Sulawesi Barat, 2020	47
Tabel 4B.	Jumlah Angkatan Kerja Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Jenis Kegiatan di Provinsi Sulawesi Barat, 2019 - 2020 ...	48
Tabel 5A.	Jumlah Pekerja Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Pekerjaan/Usaha Utama di Provinsi Sulawesi Barat, 2020.....	49
Tabel 5B.	Jumlah Pekerja Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Lapangan Pekerjaan/Usaha Utama di Provinsi Sulawesi Barat, 2019 - 2020	50
Tabel 6A.	Jumlah Pekerja Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Status Pekerjaan/Usaha Utama di Provinsi Sulawesi Barat, 2020	51



DAFTAR LAMPIRAN

Tabel 6B.	Jumlah Pekerja Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Status Pekerjaan/Usaha Utama di Provinsi Sulawesi Barat, 2019-2020	52
Tabel 7A.	Jumlah Pekerja Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Jam Kerja Selama Seminggu yang lalu di Provinsi Sulawesi Barat, 2020	53
Tabel 7B.	Jumlah Pekerja Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Jam Kerja Selama Seminggu yang lalu di Provinsi Sulawesi Barat, 2019 - 2020	54
Tabel 8A.	Jumlah Pekerja Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat, 2020	55
Tabel 8B.	Jumlah Pekerja Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat, 2019 - 2020	56
Tabel 9A.	Jumlah Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka Menurut Kelompok Umur di Provinsi Sulawesi Barat, 2020	57
Tabel 9B.	Jumlah Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka Menurut Kelompok Umur di Provinsi Sulawesi Barat, 2019-2020	58
Tabel 10A.	Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat, 2020	59
Tabel 10B.	Jumlah Pengangguran Terbuka Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat, 2019-2020	60



The background of the page is a complex, abstract pattern of blue lines and dots, resembling a circuit board or a network diagram. The lines are of varying thickness and connect various circular nodes, some of which are solid blue and others are light gray. The overall effect is a dense, interconnected web of lines and points.

BAB I

PENDAHULUAN

<http://www.bps.go.id>

1.1. Latar Belakang

Data ketenagakerjaan merupakan salah satu aspek penting dalam menggambarkan tingkat perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Gambaran ini sangat penting bagi perencana pembangunan, pengambil kebijakan, maupun pihak lain dalam upaya memonitor dinamika ketenagakerjaan. Khusus bagi pengambil keputusan, informasi yang dihasilkan dapat digunakan untuk mengambil kebijakan dalam memperbaiki permasalahan ketenagakerjaan di Provinsi Sulawesi Barat.

Salah satu sumber penyajian data ketenagakerjaan berasal dari Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) yang dilakukan secara berkesinambungan. Secara umum, tujuan pengumpulan data melalui Sakernas adalah menyediakan data pokok terkait ketenagakerjaan, baik itu mengenai jumlah penduduk yang bekerja dan pengangguran beserta karakteristiknya. Publikasi ini memuat hasil Sakernas yang dalam penyajiannya juga disertakan analisis sederhana terkait beberapa indikator ketenagakerjaan. Dalam publikasi ini disajikan pula berbagai informasi umum tentang ketenagakerjaan hasil Sakernas Agustus tahun 2020 yang bisa dimanfaatkan oleh berbagai kalangan sesuai kebutuhan. Ulasan yang diberikan dilihat dari sejumlah indikator dan karakteristik ketenagakerjaan pada umumnya, sedangkan untuk mengetahui lebih rinci dapat dilihat dalam tabel-tabel yang juga dilampirkan dalam bagian akhir publikasi ini.

Tujuan penyusunan publikasi ini adalah untuk menyediakan statistik ketenagakerjaan, meliputi gambaran umum, karakteristik penduduk yang bekerja serta profil pengangguran.



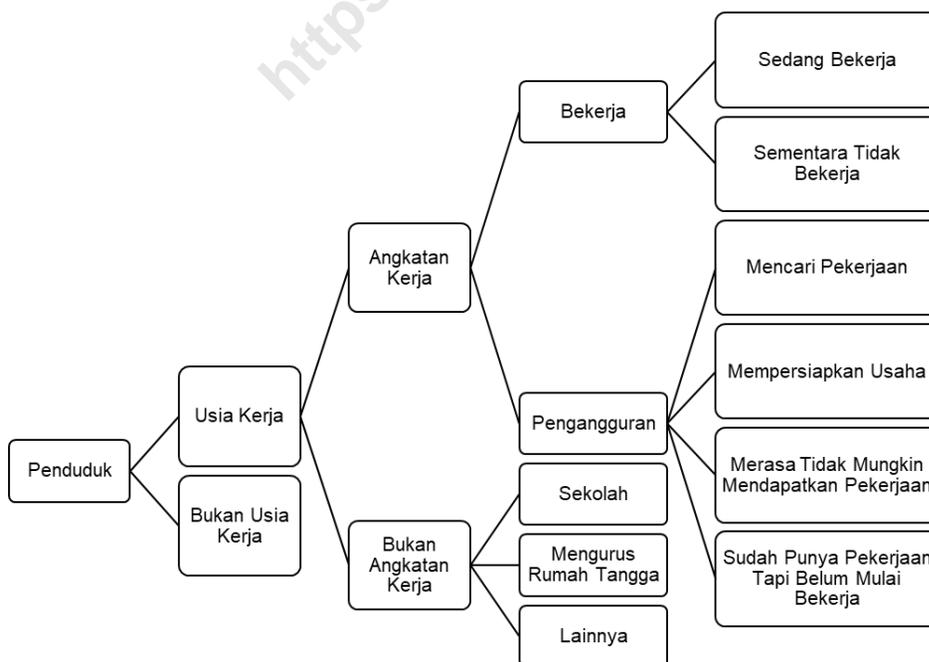
1.2. Penjelasan Umum

Untuk memahami data yang disajikan dalam publikasi ini, perlu dipahami terlebih dahulu beberapa penjelasan teknis seperti konsep dan definisi yang digunakan. Penjelasan teknis ini diharapkan agar pengguna data memiliki persepsi yang sama dan sesuai dengan apa yang dimaksudkan dalam publikasi ini.

Ada beberapa pendekatan usia kerja, tergantung dengan kebutuhan dan arah analisis serta kebijakan yang diinginkan. Untuk memberikan kemudahan bagi pengguna data, dalam publikasi ini ditampilkan pembatasan usia kerja yaitu penduduk usia 15 tahun ke atas. Penduduk usia kerja dibedakan menjadi Angkatan Kerja dan Bukan Angkatan Kerja. Penghitungan jumlah penduduk yang bekerja dan menganggur didasarkan pada konsep dasar pada gambar 1.1.

Gambar 1.1

Konsep Dasar Ketenagakerjaan



Beberapa konsep ketenagakerjaan:

a. Penduduk Usia Kerja

Penduduk Usia Kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003.

b. Penduduk Bukan Usia Kerja

Penduduk bukan usia kerja adalah penduduk yang berusia di bawah 15 tahun.

c. Angkatan Kerja

Angkatan Kerja adalah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) yang bekerja dan pengangguran

d. Bukan Angkatan Kerja

Bukan Angkatan Kerja (BAK) adalah penduduk usia kerja yang pada periode referensi tidak mempunyai/melakukan aktivitas ekonomi, baik karena sekolah, mengurus rumah tangga atau lainnya (pensiun, penerima transfer/kiriman, penerima deposito/bunga bank, jompo atau alasan yang lain).

e. Bekerja

Bekerja yaitu kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam **dalam seminggu yang lalu**. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus. Kegiatan bekerja ini mencakup, baik yang sedang bekerja maupun yang punya pekerjaan tetapi dalam seminggu yang lalu sementara tidak aktif bekerja, misal karena cuti, sakit dan sejenisnya.

Di beberapa negara, konsep bekerja didasarkan atas kebiasaan (*Gainful Worker Concept*). Konsep ini menentukan seseorang apakah bekerja atau tidak berdasarkan kebiasaannya (*usual activity*). Konsep ini tidak memakai batasan waktu tertentu.

f. Sementara Tidak Bekerja

Sementara tidak bekerja adalah orang yang mempunyai pekerjaan/usaha tetapi selama seminggu yang lalu tidak bekerja karena sesuatu sebab seperti sakit, cuti, menunggu panen, mogok kerja, dan sejenisnya.

g. Pengangguran

Terdapat dua definisi pengangguran, yaitu definisi standar dan definisi luas (*relaxed*). Pengangguran definisi standar yaitu meliputi penduduk yang tidak bekerja tetapi sedang mencari pekerjaan/mempersiapkan suatu usaha. Sedangkan pengangguran definisi luas juga mencakup penduduk yang tidak aktif mencari kerja tetapi bersedia/siap bekerja.

Kriteria pengangguran antara lain:

- 1) Mencari kerja, yaitu orang yang berusaha mencari pekerjaan (tidak terbatas dalam seminggu yang lalu).
- 2) Mempersiapkan usaha, yaitu kegiatan yang dilakukan seseorang dalam rangka mempersiapkan suatu usaha “baru” (bukan merupakan pengembangan usaha) dan bertujuan untuk memperoleh penghasilan/keuntungan atas resiko sendiri, baik dengan atau tanpa mempekerjakan orang lain.
- 3) Merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan, yaitu mereka yang mengaku berkali-kali mencari pekerjaan tetapi tidak berhasil mendapatkan pekerjaan sehingga ia merasa tidak mungkin mendapat pekerjaan. Termasuk mereka yang merasa karena situasi/kondisi atau iklim atau musim, tidak mungkin mendapatkan pekerjaan yang diinginkan.
- 4) Sudah Punya Pekerjaan Tetapi Belum Mulai Bekerja, yaitu mereka yang tidak mencari pekerjaan karena sudah diterima bekerja, tetapi pada saat pencacahan belum mulai bekerja.

Menurut Bellante dan Jackson (1990), jika dilihat dari penyebabnya pengangguran dapat dikelompokkan menjadi:

- 1) Pengangguran friksional yaitu pengangguran yang terjadi karena kesulitan temporer dalam mempertemukan pencari kerja dan lowongan kerja yang ada. Mereka berada dalam keadaan menganggur karena informasi yang kurang sempurna dan biayanya mahal untuk memperolehnya. Disebut juga pengangguran normal.
- 2) Pengangguran struktural adalah pengangguran yang terjadi karena terdapat lowongan pekerjaan tetapi membutuhkan keahlian yang berbeda daripada yang dimiliki penganggur atau lowongan pekerjaan berada dalam kawasan geografis lain dari lokasi tempat tinggal penganggur.
- 3) Pengangguran karena kurangnya permintaan, yaitu timbul karena pada tingkat upah dan harga yang sedang berlaku, tingkat permintaan akan tenaga kerja secara keseluruhan terlampau rendah. Dengan kata lain, jumlah tenaga kerja yang diminta perekonomian secara keseluruhan lebih rendah dibandingkan dengan jumlah pekerja yang menawarkan pekerjaan.

Menurut Sukirno (1995), akibat buruk yang ditimbulkan oleh masalah pengangguran terhadap kegiatan perekonomian yaitu:

- 1) Pengangguran menyebabkan masyarakat tidak memaksimalkan tingkat kemakmuran yang mungkin dicapainya.
- 2) Pengangguran menyebabkan pendapatan pajak pemerintah berkurang.
- 3) Pengangguran tidak menggalakkan pertumbuhan ekonomi.

Akibat buruk yang ditimbulkan masalah pengangguran terhadap individu dan masyarakat yaitu:

- 1) Pengangguran menyebabkan kehilangan mata pencarian dan pendapatan;
- 2) Pengangguran menyebabkan kehilangan keterampilan;
- 3) Pengangguran dapat menimbulkan ketidakstabilan sosial dan politik.

h. Pekerja Tidak Penuh

Pekerja tidak penuh adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu). Pekerja tidak penuh terbagi menjadi dua yaitu:

- 1) Setengah Pengangguran adalah mereka yang bekerja di bawah jam kerja normal (kurang dari 35 jam seminggu) dan masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan.
- 2) Pekerja paruh waktu (*part time worker*) yaitu jika seseorang bekerja di bawah jam kerja normal tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain.

Konsep setengah pengangguran diperkenalkan untuk mengidentifikasi adanya kekurangan dalam bekerja (*lack of work*). Setengah pengangguran banyak terjadi di negara yang belum memiliki jaminan sosial bagi pengangguran, sehingga kondisi tersebut membuat seseorang harus melakukan pekerjaan apa saja untuk dapat memenuhi kebutuhan hidupnya termasuk pekerjaan yang tidak layak.

i. Pengangguran Terselubung

Di beberapa negara-negara berkembang yang terdapat kelebihan penawaran tenaga kerja dan sempitnya lapangan kerja terdapat pengangguran terselubung. Mereka yang secara konsep dan definisi tergolong dalam penduduk yang “bekerja”, tetapi sebetulnya jika dilihat dari segi produktifitas dalam pekerjaannya mereka adalah penganggur. Sebagai contoh, ada empat orang yang bekerja membuat sebuah kursi padahal sebenarnya bobot pekerjaannya cukup dikerjakan oleh dua orang saja dengan waktu yang sama. Kondisi inilah yang disebut pengangguran terselubung (Adioetomo dan Samosir, 2010).

j. Lapangan Usaha

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan suatu organisasi/lembaga/usaha (*establishment*) tempat seseorang bekerja selama periode waktu acuan yang dibuat untuk data karakteristik ekonomi (atau yang dikerjakan terakhir, jika orang tersebut tidak bekerja). Kegiatan *establishment* adalah jenis barang yang diproduksi atau jasa yang diberikan.

k. Status Pekerjaan

Status pekerjaan adalah kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaan di suatu unit usaha. Biasanya dikelompokkan menjadi:

- 1) Berusaha sendiri;
- 2) Berusaha dibantu buruh tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar;
- 3) Berusaha dibantu buruh tetap/dibayar;
- 4) Buruh/karyawan/pegawai;
- 5) Pekerja bebas di pertanian;
- 6) Pekerja bebas di non pertanian;
- 7) Pekerja keluarga/tidak dibayar.

l. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)

TPAK merupakan persentase angkatan kerja terhadap penduduk usia kerja. TPAK menunjukkan besaran penduduk usia kerja yang telah siap terjun ke dunia kerja (membutuhkan pekerjaan), baik yang sudah mendapatkan pekerjaan maupun yang belum bekerja.

m. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

TPT merupakan persentase penduduk angkatan kerja yang belum mendapatkan pekerjaan. Tingkat pengangguran menunjukkan besaran penduduk usia kerja yang siap terjun ke dunia kerja (membutuhkan pekerjaan), tetapi belum mendapatkan pekerjaan.



<https://www.bps.go.id>

BAB II

KETENAGAKERJAAN

2.1. Angkatan Kerja

Penduduk usia kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada bulan Agustus 2020 berjumlah 992 ribu orang, terdiri dari 497 ribu laki-laki dan 495 ribu perempuan. Jumlah ini mengalami kenaikan 25 ribu orang dibandingkan dengan Februari 2020. Dalam kurun waktu satu tahun, jumlah penduduk usia kerja meningkat 35 ribu orang jika dibandingkan dengan kondisi bulan Agustus 2019. Peningkatan jumlah penduduk usia kerja merupakan dampak dari penambahan jumlah penduduk usia 15 tahun pada Agustus 2020 yang sebelumnya berusia 14 pada periode Februari 2020 atau Agustus 2019. Selain itu, peningkatan jumlah penduduk usia kerja dapat diakibatkan oleh migrasi masuk, dimana terdapat penduduk usia kerja yang masuk dari luar wilayah dan menjadi penduduk Provinsi Sulawesi Barat pada Agustus 2020.

Jumlah angkatan kerja di Provinsi Sulawesi Barat pada Agustus 2020 mencapai 696 ribu orang. Mengingat mayoritas penduduk di Sulawesi Barat tinggal di wilayah perdesaan, 80 persen angkatan kerja berasal dari wilayah perdesaan dan 20 persen lainnya berasal dari wilayah perkotaan. Dilihat dari struktur jenis kelamin, 61 persen angkatan kerja berjenis kelamin laki-laki, sedangkan 39 persen lainnya adalah perempuan. Sementara itu, terdapat 296 ribu penduduk yang tidak termasuk dalam angkatan kerja. Penduduk yang tidak masuk dalam angkatan kerja tersebut mencakup penduduk usia kerja yang tidak aktif terlibat dalam pasar kerja dan memiliki kegiatan utama sekolah, mengurus rumah tangga, atau kegiatan lainnya. Pada bulan Agustus 2020, mayoritas penduduk usia kerja yang tidak masuk dalam angkatan kerja memiliki kegiatan utama mengurus rumah tangga.

Partisipasi aktif penduduk usia kerja dalam pasar kerja dapat dilihat dengan indikator Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK melihat seberapa besar partisipasi penduduk yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi produksi barang dan jasa maupun ketersediaan tenaga kerja (*labor supply*) untuk dilibatkan dalam kegiatan produksi barang atau jasa. TPAK merupakan proporsi angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (15 tahun ke atas).



Tabel 2.1.
Penduduk Usia Kerja, Angkatan Kerja, dan Tingkat Partisipasi
Angkatan Kerja di Provinsi Sulawesi Barat, 2019 – 2020

Uraian	2019		2020	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Penduduk Usia Kerja	947 771	956 647	966 982	991 723
Angkatan Kerja	669 939	662 667	673 975	696 118
Bukan Angkatan Kerja	277 832	293 980	293 007	295 605
TPAK	70,69	69,27	69,70	70,19

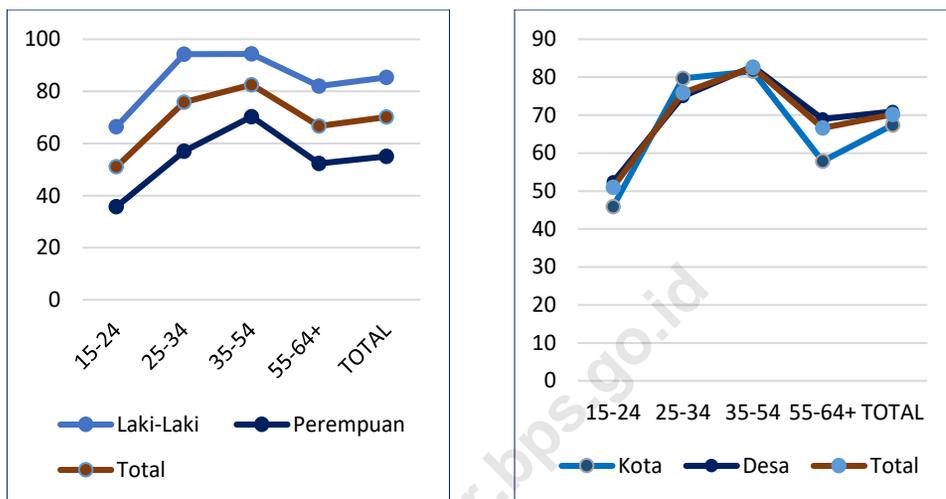
Sumber: Diolah dari Sakernas 2019 – 2020

TPAK Provinsi Sulawesi Barat pada bulan Agustus 2020 mencapai 70 persen. Dari angka ini dapat diartikan bahwa dari 100 penduduk usia kerja, terdapat 70 orang yang aktif dalam kegiatan ekonomi. Angka ini lebih tinggi jika dibandingkan dengan kondisi Agustus 2019 dan Februari 2020, namun lebih rendah jika dibandingkan dengan Februari 2019. Kenaikan atau penurunan TPAK di Provinsi Sulawesi barat tidak lepas dari pengaruh musiman pada penduduk yang bekerja sebagai pekerja bebas atau pekerja keluarga di sektor pertanian. Pada musim tertentu, kegiatan pertanian maupun perikanan harus terhenti sementara sehingga menyebabkan pekerja bebas maupun pekerja keluarga di sektor ini tidak masuk dalam angkatan kerja.

Gambar 2.1. dapat memberikan gambaran perbedaan TPAK menurut jenis kelamin dan wilayah kota/desa dan kelompok umur. Terlihat bahwa TPAK memiliki pola naik pada kelompok umur 15-54 tahun dan mulai turun pada umur 55 tahun ke atas. Hal ini terjadi pada TPAK menurut jenis kelamin maupun wilayah desa/kota.

Gambar 2.1.

TPAK Menurut Kelompok Umur di Provinsi Sulawesi Barat, 2020



Sumber: Diolah dari Sakernas 2019 – 2020

TPAK laki-laki selalu lebih tinggi daripada TPAK perempuan di semua kelompok umur. Terlihat bahwa TPAK laki-laki mencapai 85 persen, sedangkan TPAK perempuan 55 persen. Hal ini tidak terlepas budaya dan anggapan umum masyarakat yang memandang tugas laki-laki sebagai pencari nafkah utama di dalam rumah tangga, sedangkan perempuan dipandang memiliki tugas utama mengurus keluarga. Penduduk usia kerja laki-laki lebih banyak yang terlibat aktif dalam bekerja, sedangkan perempuan yang tidak terlibat secara aktif di pasar kerja mayoritas memiliki kegiatan utama mengurus rumah tangga.

TPAK pada kelompok umur 35-54 tahun lebih tinggi dibandingkan dengan kelompok umur lainnya, sedangkan TPAK pada kelompok umur 15-24 tahun merupakan yang terendah. Umumnya, hal ini terjadi karena penduduk usia 35-54 tahun merupakan kelompok usia yang paling aktif dalam kegiatan bekerja, sedangkan penduduk kelompok umur 15-24 tahun masih aktif bersekolah. Pada penduduk kelompok umur 55 tahun ke atas, grafik TPAK turun disebabkan oleh produktivitas kerja penduduk di kelompok usia ini mulai menurun dan memasuki usia pensiun.

Total TPAK di wilayah desa mencapai 71 persen, sedangkan TPAK di wilayah kota mencapai 67 persen. Terdapat perbedaan pola TPAK pada penduduk yang tinggal di wilayah kota dan desa. TPAK pada kelompok umur 25-34 tahun yang tinggal di wilayah kota lebih tinggi dibandingkan dengan penduduk pada kelompok sama yang tinggal di wilayah desa. Sementara itu, TPAK pada penduduk kelompok umur 15-24 tahun di wilayah desa lebih tinggi dibandingkan dengan di wilayah kota. Hal ini disebabkan karena penduduk kelompok usia 15-24 tahun di wilayah desa mayoritas sudah terjun ke pasar kerja, sedangkan penduduk di wilayah kota mayoritas masih melanjutkan pendidikan/sekolah. Pada kelompok umur 25-34 tahun, penduduk usia kerja di kota lebih banyak terlibat langsung dalam kegiatan ekonomi di pasar kerja. Setelah mencapai umur 55 tahun ke atas, partisipasi penduduk di wilayah kota pada kegiatan ekonomi mengalami penurunan tajam dibandingkan di wilayah desa. Hal ini disebabkan oleh penduduk di wilayah kota yang sudah memasuki usia pensiun, sedangkan penduduk di wilayah desa yang mayoritas bekerja di sektor pertanian masih aktif bekerja.

3.1. Penduduk yang Bekerja

Pada bulan Agustus 2020, total penduduk Sulawesi Barat yang bekerja adalah 673 ribu orang. Dari total penduduk yang bekerja, 81 persen tinggal di wilayah desa, dan 19 persen lainnya tinggal di wilayah kota. Jika dirinci menurut jenis kelamin, 61 persen penduduk bekerja adalah laki-laki. Total penduduk bekerja pada bulan Agustus 2020 mengalami kenaikan 31 ribu orang dibandingkan Agustus 2020. Rasio antara penduduk bekerja terhadap jumlah penduduk usia kerja (*Employment to Population Ratio/EPR*) di Sulawesi Barat pada Agustus 2020 mencapai 67,86. Dari angka ini, dapat diartikan bahwa dari 100 penduduk usia kerja di Sulawesi Barat, terdapat 68 orang yang aktif bekerja. Nilai EPR pada bulan Agustus 2020 mengalami penurunan 0,02 persen poin dibandingkan bulan Februari 2020, tetapi naik 0,79 persen poin jika dibandingkan dengan Agustus 2019. Dengan indikator EPR ini, dapat diketahui kemampuan ekonomi suatu wilayah dalam menyerap angkatan kerja yang tersedia ke dalam lapangan pekerjaan.

Tabel 2.2.
Penduduk Usia Kerja, Penduduk Yang Bekerja dan EPR
di Provinsi Sulawesi Barat, 2019-2020

Uraian	2019		2020	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
	(1)	(2)	(3)	(4)
Penduduk Usia Kerja	947 771	956 647	966 982	991 723
Penduduk yang Bekerja	660 257	641 613	656 377	672 986
EPR	69, 66	67, 07	67, 88	67, 86

EPR: *Employment to Population Ratio*

Sumber: Diolah dari Sakernas 2019 – 2020

Pergerakan EPR di Sulawesi Barat pada bulan Februari 2019 sampai bulan Agustus 2020 memiliki pola yang sejalan dengan TPAK. Nilai EPR turun pada bulan Agustus 2019, kemudian kembali naik pada bulan Februari, dan turun kembali pada Agustus 2020. Hal ini mengindikasikan bahwa penyerapan penduduk usia kerja Provinsi Sulawesi Barat dalam lapangan pekerjaan di bulan Agustus 2020 lebih besar dibandingkan Agustus 2019. Faktor-faktor yang memengaruhi pola EPR pada periode tertentu tidak jauh berbeda dari TPAK. Mengingat persentase penduduk Sulawesi Barat yang bekerja di sektor pertanian sebagai pekerja bebas atau pekerja keluarga cukup tinggi, faktor musim akan memengaruhi nilai EPR. Masa tunggu panen, cuaca buruk sehingga nelayan tidak dapat melaut, atau faktor lain yang menyebabkan kegiatan di sektor pertanian menurun akan diikuti oleh penurunan jumlah penduduk bekerja sekaligus penurunan EPR. Di bulan Februari, sektor pertanian di Sulawesi Barat cenderung lebih aktif dan memerlukan lebih banyak tenaga kerja dibandingkan dengan bulan Agustus.

3.2. Lapangan Pekerjaan

Publikasi ini menggunakan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2009 untuk mengelompokkan lapangan pekerjaan utama penduduk yang bekerja. Terdapat lima kategori/sektor lapangan usaha yang ditampilkan dalam publikasi ini. Adapun kategori/sektor lapangan pekerjaan/usaha yang digunakan meliputi:

1. Pertanian, kehutanan, perburuan, dan perikanan;
2. Industri pengolahan;
3. Perdagangan besar, perdagangan eceran, rumah makan dan hotel;
4. Jasa kemasyarakatan, sosial dan perorangan.
5. Lainnya, yaitu: i) Pertambangan dan penggalan; ii) Listrik, gas, dan air; iii) Konstruksi; iv) Transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi; v) Keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan.

Berdasarkan Tabel 2.3. dapat diketahui bahwa pertanian merupakan lapangan usaha yang menyumbang persentase tertinggi (50,19 persen) dan masih menjadi sektor yang menyerap tenaga kerja terbesar di Sulawesi Barat. Sekitar 338 ribu penduduk Sulawesi Barat bekerja di sektor pertanian. Setelah sektor pertanian, sektor terbesar kedua adalah perdagangan (17,11 persen) dan jasa-jasa (14,58 persen). Untuk industri pengolahan sebesar 7,6 persen, dan sektor lainnya persentasenya 10,48 persen.

Berdasarkan klasifikasi daerah, penduduk di wilayah kota paling banyak bekerja di sektor perdagangan (31,72 persen) dan jasa-jasa (24,14 persen). Berbeda dengan wilayah kota, penduduk di wilayah desa terserap di sektor pertanian (57,49 persen). Dengan demikian, 1 dari 2 penduduk di desa bekerja di sektor pertanian. Mengingat lapangan pekerjaan dan lahan pertanian lebih banyak tersedia di desa, sektor pertanian masih menjadi mata pencarian utama di wilayah desa. Peluang bekerja di sektor perdagangan dan jasa-jasa lebih banyak tersedia di wilayah kota, karena umumnya perilaku penduduk di wilayah kota cenderung lebih konsumtif. Selain itu, hal tersebut dikarenakan penduduk Sulawesi Barat lebih banyak yang tinggal di wilayah desa dibandingkan di kota.

Penduduk berjenis kelamin laki-laki maupun perempuan paling banyak bekerja di sektor pertanian. Setelah sektor pertanian, sektor jasa dan sektor lainnya (pertambangan dan penggalian, listrik, gas, dan air, konstruksi, transportasi, pergudangan, dan telekomunikasi, keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah, dan jasa perusahaan) adalah yang paling dominan dikerjakan oleh laki-laki. Persentasi laki-laki di industri pengolahan kurang dari sepuluh persen. Untuk penduduk perempuan, sektor terbesar kedua dan ketiga adalah perdagangan dan jasa-jasa. Pada sektor industri pengolahan juga lebih dominan dikerjakan oleh perempuan dibandingkan laki-laki. Sementara itu, sektor lainnya pada perempuan persentasenya kurang dari dua persen.

Tabel 2.3
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan/Usaha Utama di Provinsi Sulawesi Barat, 2020

Uraian	Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Kota	Desa	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian	19,84	57,49	56,91	39,71	50,19
Industri Pengolahan	9,64	7,16	6,20	9,88	7,64
Perdagangan	31,72	13,59	10,02	28,16	17,11
Jasa-jasa	24,14	12,28	10,77	20,52	14,58
Lainnya	14,66	9,48	16,10	1,73	10,48
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah Penduduk Bekerja	130 418	542 568	409 932	263 054	672 986

Sumber: Diolah dari Sakernas Agustus 2020

3.3. Status Pekerjaan

Status pekerjaan mengacu kepada kedudukan seseorang dalam melakukan pekerjaannya. Informasi status pekerjaan dibagi menjadi tujuh, yaitu: 1) Berusaha sendiri; 2) Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar; 3) Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar; 4) Buruh/karyawan/pegawai; 5) Pekerja bebas di pertanian; 6) Pekerja bebas di non pertanian; 7) Pekerja keluarga/ tidak dibayar. Informasi status pekerjaan utama yang disajikan dalam publikasi ini terdiri dari 4 kategori:

1. Berusaha (mencakup berusaha sendiri maupun berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar/buruh tetap/buruh dibayar);
2. Buruh/karyawan/pegawai;
3. Pekerja bebas (baik di pertanian maupun non pertanian)
4. Pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar.

Pada tahun 2020, mayoritas penduduk bekerja dengan status berusaha (46,58 persen) dari total 673 ribu penduduk bekerja. Status pekerjaan utama terbesar kedua adalah buruh/karyawan/pegawai, dan yang ketiga adalah pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar. Tingginya persentase pekerja keluarga/tidak dibayar menunjukkan bahwa banyak penduduk yang bekerja tanpa memperoleh upah/gaji, sehingga sangat bergantung kepada kepala keluarga atau famili yang dibantu pekerjaannya. Sementara itu, terdapat 6,76 persen penduduk yang statusnya sebagai pekerja bebas, baik di pertanian maupun non pertanian. Seseorang dikatakan sebagai pekerja bebas apabila tidak memiliki majikan tetap dalam sebulan terakhir (pengecualian untuk sektor bangunan minimal memiliki majikan tetap selama 3 bulan terakhir).

Berdasarkan klasifikasi daerahnya, penduduk di wilayah kota lebih dominan berstatus sebagai berusaha (43,68 persen) dan buruh/karyawan/pegawai (35,59 persen). Di wilayah desa, status pekerjaan utama terbesar masih sama dengan di kota, yaitu berusaha (47,28 persen), diikuti oleh kategori pekerja keluarga/tidak dibayar (23,04 persen). Sementara itu, persentase pekerja bebas baik di kota maupun desa cenderung kecil.



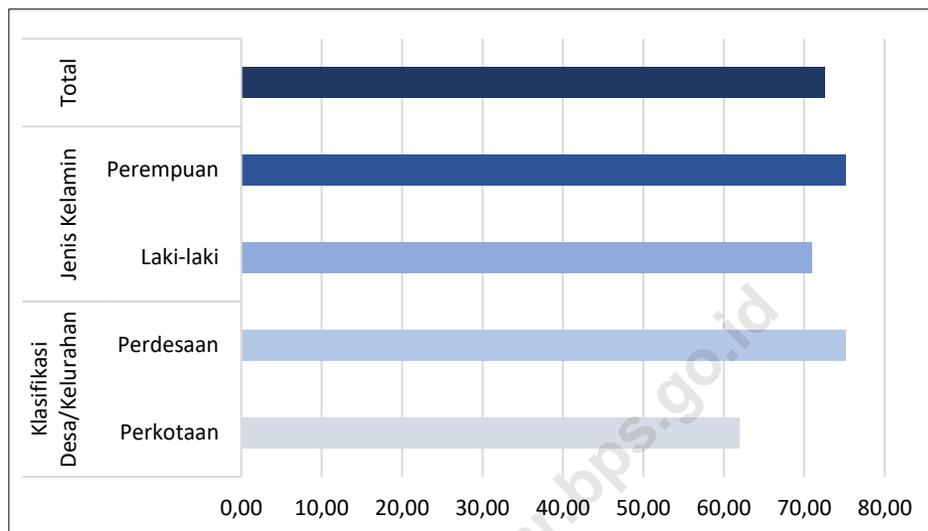
Tabel 2.4
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama
di Provinsi Sulawesi Barat, 2020

Status Pekerjaan Utama	Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Kota	Desa	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Berusaha	43,68	47,28	52,68	37,08	46,58
Buruh/Karyawan/Pegawai	35,59	22,71	25,99	23,97	25,20
Pekerja Bebas	5,80	6,99	9,28	2,84	6,76
Pekerja Keluarga/Pekerja Tidak Dibayar	14,93	23,02	12,04	36,11	21,45
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah Penduduk Bekerja	130 418	542 568	409 932	263 054	672 986

Sumber: Diolah dari Sakernas Agustus 2020

Ditinjau dari jenis kelamin, terdapat perbedaan struktur status pekerjaan utama antara laki-laki dan perempuan, meskipun persentase terbesarnya masih sama, yaitu berusaha. Pada kelompok penduduk laki-laki, status pekerjaan utama terbesar setelah 'berusaha' adalah buruh/karyawan/pegawai (35,59 persen) dan pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar. Sedangkan pada kelompok penduduk perempuan, status pekerjaan utama yang paling dominan setelah 'berusaha' adalah pekerja keluarga/tidak dibayar (36,11 persen) dan buruh/karyawan/pegawai (23,97 persen). Tingginya persentase perempuan pada status pekerja keluarga/pekerja tidak dibayar umumnya disebabkan karena perempuan sebagai istri di dalam rumah tangganya membantu pekerjaan suaminya sebagai kepala rumah tangga tanpa upah/tidak dibayar. Dengan demikian, pendapatannya akan sangat bergantung pada pendapatan yang dihasilkan suami/pasangannya.

Gambar 2.2
Persentase Pekerja Informal di Provinsi Sulawesi Barat, 2020



Sumber: Diolah dari Sakernas Agustus 2020

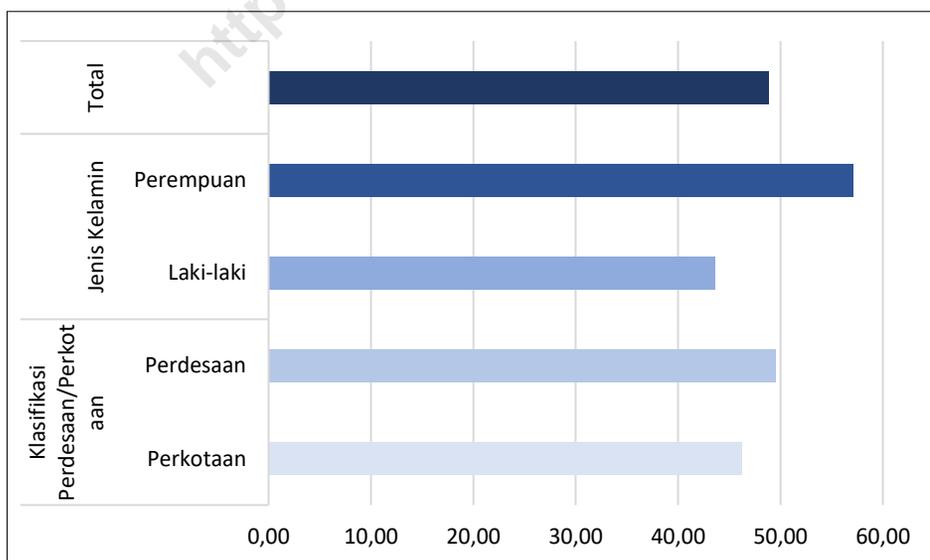
Dari indikator status pekerjaan utama, dapat diperoleh indikator lain yaitu persentase pekerja sektor informal. Pekerja di sektor informal yang dimaksud adalah mereka yang bekerja dengan status berusaha sendiri, berusaha dibantu buruh tidak tetap/tidak dibayar, pekerja bebas di pertanian, pekerja bebas di non pertanian, dan pekerja keluarga/tidak dibayar. Pekerjaan pada sektor informal ini biasanya berbentuk usaha rumah tangga atau perorangan.

Pada bulan Agustus 2020, persentase pekerja informal di Provinsi Sulawesi Barat mencapai 72,63 persen. Dari angka ini, dapat diartikan bahwa secara rata-rata, terdapat 73 pekerja informal dari setiap 100 penduduk yang bekerja. Persentase pekerja informal pada perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Hal ini tidak lepas dari tingginya persentase perempuan yang berstatus sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar. Persentase pekerja sektor informal di wilayah perdesaan juga lebih tinggi dibandingkan di wilayah perkotaan. Pekerjaan yang tersedia di wilayah desa mayoritas adalah usaha rumah tangga yang melibatkan kerabat/famili sebagai pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar.

Dari data status pekerjaan, dapat pula diperoleh persentase pekerja rentan (*vulnerable employment*) terhadap total penduduk yang bekerja. Konsep yang digunakan mengacu pada publikasi Indikator Pasar Tenaga Kerja Indonesia yang merujuk kepada KILM-ILO (*Key Indicator of the Labour Market – International Labour Organization*), yaitu penduduk yang bekerja dengan status dalam pekerjaan utama adalah berusaha sendiri, pekerja bebas baik di pertanian maupun di non pertanian, serta pekerja keluarga atau pekerja tidak dibayar.

Berdasarkan definisi tersebut, persentase pekerja rentan di Provinsi Sulawesi Barat sebesar 49 persen. Hal ini berarti bahwa dari 100 orang yang bekerja terdapat sekitar 49 orang yang masuk kategori pekerja rentan. Mereka adalah orang-orang yang pada masa yang akan datang memiliki peluang paling besar untuk beralih jenis pekerjaan atau bahkan tidak bekerja lagi, baik sebagai pengangguran (karena masih membutuhkan pekerjaan) atau keluar dari angkatan kerja.

Gambar 2.3
Persentase Pekerja Rentan (*Vulnerable Employment*)
di Provinsi Sulawesi Barat, 2020



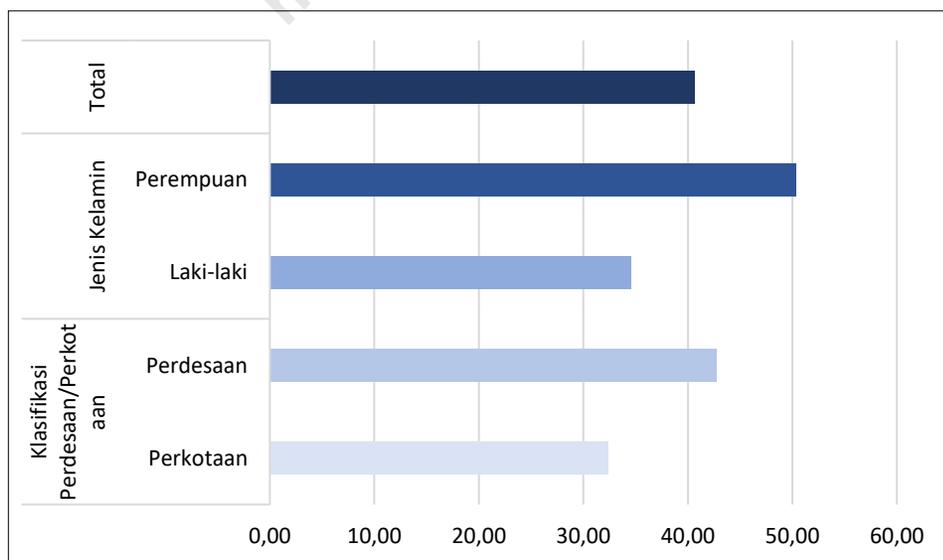
Sumber: Diolah dari Sakernas Agustus 2020

Dilihat dari jenis kelamin, persentase pekerja rentan pada perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki (57 persen). Jika dilihat berdasarkan klasifikasi daerahnya, pekerja rentan di wilayah desa lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Tingginya persentase pekerja rentan pada perempuan dan pekerja di wilayah perdesaan disebabkan oleh banyaknya pekerja yang berstatus sebagai pekerja keluarga/tidak dibayar yang membantu kepala keluarga atau famili dalam rumah tangganya untuk memperoleh pendapatan atau penghasilan.

3.4. Pekerja Paruh Waktu

Menurut jumlah jam kerjanya, pekerja dikelompokkan menjadi dua, yaitu pekerja penuh (bekerja minimal 35 jam dalam seminggu) dan pekerja tidak penuh (bekerja kurang dari 35 jam dalam seminggu). Pekerja tidak penuh dibagi lagi menjadi dua kategori, yaitu pekerja paruh waktu dan setengah pengangguran. Pekerja paruh waktu adalah penduduk yang bekerja di bawah jam kerja penuh/waktu normal, tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain.

Gambar 2.4
Persentase Pekerja Paruh Waktu
di Provinsi Sulawesi Barat, 2020



Sumber: Diolah dari Sakernas Agustus 2020



Dari 100 pekerja di Sulawesi Barat, terdapat 41 orang yang tercatat sebagai pekerja paruh waktu. Angka ini meningkat 5,66 persen poin dibandingkan dengan bulan Februari 2020. Persentase pekerja paruh waktu pada perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki. Dari total pekerja perempuan, setengahnya merupakan pekerja paruh waktu. Sedangkan pada laki-laki, persentase pekerja paruh waktu mencapai 34,54 persen. Dilihat dari klasifikasi daerahnya, persentase pekerja paruh waktu di wilayah perdesaan lebih tinggi dibandingkan perkotaan. Di wilayah perdesaan, persentase pekerja paruh waktu mencapai 42,71 persen. Pekerjaan paruh waktu di Sulawesi Barat tidak berkaitan langsung dengan upah/pendapatan karena sangat sedikit yang menerapkan upah per jam. Pekerja yang memilih bekerja paruh waktu umumnya menginginkan jam kerja fleksibel dengan upah/pendapatan yang cukup tinggi.

3.5. Jumlah Jam Kerja

Pembahasan mengenai tenaga kerja tidak lepas dari pengukuran jumlah jam kerja. Dalam analisis ekonomi dan sosial, pengukuran jumlah jam kerja masyarakat penting dilakukan. Hal ini dikarenakan keterkaitan jam kerja terhadap beberapa aspek, diantaranya dari sisi pekerja dapat berdampak kepada tingkat kesejahteraan dan kesehatan pekerja, dan dari sisi perusahaan dapat berdampak kepada produktivitas dan biaya tenaga kerja yang harus dikeluarkan. Dalam pelaksanaan Sakernas, yang dimaksud dengan jumlah jam kerja adalah lama waktu (dalam jam) yang digunakan untuk bekerja dari seluruh pekerjaan yang dilakukan selama seminggu yang lalu. Untuk mempermudah penyajian, jumlah jam kerja tersebut dikelompokkan ke dalam beberapa bagian.

Berdasarkan Tabel 2.5 terdapat 43 persen penduduk Sulawesi Barat yang bekerja lebih dari 35 jam dalam seminggu. Dari angka ini, mayoritas adalah pekerja yang tinggal di daerah perkotaan dan berjenis kelamin laki-laki. Mengingat bahwa kota merupakan pusat kegiatan perekonomian, maka jam kerja di wilayah kota umumnya lebih tinggi dibanding di desa. Selain itu, pandangan bahwa laki-laki merupakan pencari nafkah utama untuk pembiayaan sehari-hari dalam rumah tangga, maka jam kerja penduduk laki-laki menjadi lebih tinggi dibandingkan perempuan.



Tabel 2.5
Persentase Penduduk yang Bekerja Menurut Jumlah Jam Kerja
di Provinsi Sulawesi Barat, 2020

Jumlah Jam Kerja	Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Kota	Desa	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0 jam *)	4,44	4,28	3,99	4,81	4,31
1-7 jam	4,84	7,19	3,84	11,25	6,74
8-14 jam	9,78	13,35	9,74	17,20	12,66
15-24 jam	13,57	18,90	16,20	20,45	17,86
25-34 jam	12,23	16,20	17,56	12,13	15,43
35+ jam	55,15	40,08	48,68	34,15	43,00
Total	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
Jumlah Penduduk Bekerja	130 418	542 568	409 932	263 054	672 986

Keterangan: 0 jam *) Sementara tidak bekerja

Sumber: Diolah dari Sakernas Agustus 2020

Persentase penduduk dengan jumlah jam kerja 15-24 jam secara total menempati urutan kedua, diikuti oleh kelompok dengan jumlah jam kerja 25-34 jam dalam seminggu. Sementara itu, terdapat 6,74 persen penduduk dengan jumlah jam kerja 1-7 jam seminggu dan terdapat 4,31 persen penduduk yang sementara tidak bekerja. Persentase penduduk dengan jumlah jam kerja kurang dari 35 jam dalam seminggu di wilayah perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan perkotaan. Begitu juga dengan kelompok penduduk perempuan, persentase penduduk perempuan dengan jumlah jam kerja kurang dari 35 jam seminggu lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki.

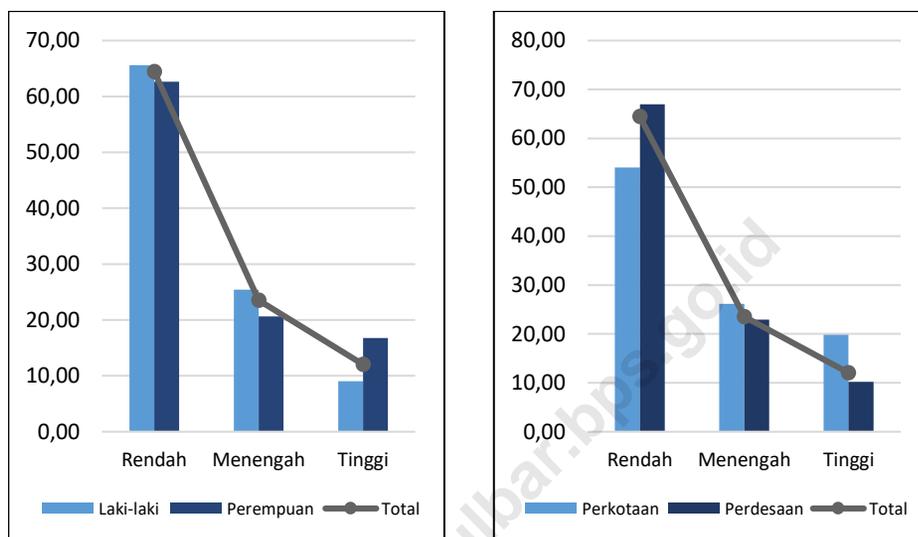
3.6. Pendidikan Pekerja

Tingkat pendidikan merupakan salah satu tolok ukur kualitas pekerja. Pendekatan untuk mengukur tingkat pendidikan adalah melalui kepemilikan ijazah/STTB tertinggi yang ditamatkan, sebagai tanda bahwa penduduk tersebut telah menamatkan suatu jenjang pendidikan tertentu. Terdapat banyak kategori tingkat pendidikan yang ditamatkan, namun untuk keperluan analisis dalam publikasi ini akan dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:

1. Pendidikan rendah, yaitu pekerja yang telah menamatkan pendidikan maksimal pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat. Yang termasuk dalam kategori ini adalah pekerja yang tidak/belum pernah sekolah dan belum tamat sekolah dasar, tamat sekolah dasar atau sederajat, dan tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.
2. Pendidikan Menengah yaitu pekerja yang sudah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat. Yang termasuk dalam kategori ini adalah pekerja yang tamat sekolah menengah atas atau sederajat dan sekolah menengah kejuruan.
3. Pendidikan Tinggi yaitu pekerja yang sudah menamatkan pendidikan minimal diploma I. Yang termasuk dalam kategori ini adalah pekerja yang tamat Diploma I/II/III, jenjang strata 1 / diploma IV dan jenjang pendidikan strata 2 atau 3.

Gambaran tingkat pendidikan pekerja di Sulawesi Barat pada bulan Agustus 2020 dapat dilihat pada Gambar 2.5. Mayoritas pekerja di Sulawesi Barat masih berpendidikan rendah (64,43 persen). Pekerja dengan tingkat pendidikan menengah sebesar 23,53 persen, sedangkan pekerja dengan pendidikan tinggi hanya sebesar 12,04 persen. Dilihat dari jenis kelaminnya, pekerja dengan tingkat pendidikan rendah dan menengah tinggi pada laki-laki lebih tinggi daripada perempuan. Sementara itu, pekerja dengan tingkat pendidikan tinggi pada perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Kemungkinan penyebabnya adalah perempuan dengan pendidikan menengah kebawah cenderung tidak masuk dalam pasar kerja, sedangkan perempuan dengan pendidikan tinggi akan lebih percaya diri untuk terlibat langsung sebagai angkatan kerja.

Gambar 2.5
Persentase Pekerja Menurut Tingkat Pendidikan
di Provinsi Sulawesi Barat, 2020



Sumber: Diolah dari Sakernas Agustus 2020

Dirinci menurut klasifikasi daerahnya, terlihat perbedaan mencolok antara tingkat pendidikan pekerja di wilayah perkotaan dan perdesaan. Kelompok pekerja dengan tingkat pendidikan rendah di daerah perdesaan lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Selisih antara keduanya mencapai 12,9 persen poin. Untuk kelompok tingkat pendidikan menengah dan tingkat pendidikan tinggi, persentase pekerja di wilayah perdesaan lebih rendah dibandingkan perkotaan, bahkan selisih untuk kelompok tingkat pendidikan tinggi mencapai 9,66 persen poin. Hal ini dimungkinkan karena ketersediaan sarana pendidikan menengah sampai pendidikan tinggi di wilayah kota lebih memadai di wilayah perdesaan. Ketika penduduk di wilayah perkotaan merasa pendidikannya sudah cukup untuk masuk ke pasar kerja barulah mereka terlibat langsung sebagai angkatan kerja, sehingga pekerja di wilayah kota cenderung memiliki tingkat pendidikan lebih tinggi dibandingkan di desa. Sedangkan penduduk di wilayah perdesaan walaupun dengan pendidikan rendah cenderung lebih cepat masuk ke pasar kerja.



BAB III
PENGANGGURAN
DAN
SETENGAH PENGANGGURAN

3.1. Pengangguran

Pengangguran didefinisikan sebagai mereka yang tidak mempunyai pekerjaan, sedang mencari pekerjaan dan bersedia untuk bekerja. Secara spesifik, penganggur dalam sakernas terdiri dari:

1. Mereka yang tidak bekerja dan mencari pekerjaan;
2. Mereka yang tidak bekerja dan mempersiapkan usaha;
3. Mereka yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan;
4. Mereka yang tidak bekerja dan tidak mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha karena sudah diterima bekerja, tetapi belum mulai bekerja

Pada Agustus 2020, jumlah pengangguran di Provinsi Sulawesi Barat mencapai 23 ribu orang, terdiri dari 14 ribu laki-laki dan 9 ribu perempuan. Dilihat dari wilayahnya, jumlah pengangguran di wilayah desa lebih tinggi dibandingkan dengan di perkotaan. Hal ini sejalan dengan jumlah angkatan kerja di desa yang lebih tinggi dibandingkan di kota, khususnya di Provinsi Sulawesi Barat.

Salah satu indikator utama statistik ketenagakerjaan adalah Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). TPT merupakan indikator untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha di pasar kerja serta menggambarkan kurang termanfaatkannya pasokan tenaga kerja. Selain itu, TPT juga menggambarkan kemampuan ekonomi pasar kerja yang belum bisa menciptakan pekerjaan bagi penduduk yang ingin bekerja tapi belum mendapatkannya. TPT diperoleh dari jumlah pengangguran dibagi dengan jumlah angkatan kerja.

TPT Sulawesi Barat pada bulan Agustus 2020 sebesar 3,32 persen atau sebanyak 9 ribu orang. Artinya, dari 100 angkatan kerja terdapat 3 orang yang menganggur. Tingkat pengangguran di wilayah perkotaan cenderung lebih tinggi daripada perdesaan. Dilihat dari jenis kelamin, pengangguran pada perempuan sedikit lebih tinggi daripada laki-laki.



Tabel 3.1
Jumlah Angkatan Kerja, Pengangguran, dan Tingkat Pengangguran
Terbuka (TPT) di Provinsi Sulawesi Barat, 2020

Uraian	Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Kota	Desa	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angkatan Kerja	137 028	559 090	423 956	272 162	696 118
Pengangguran	6 610	16 522	14 024	9 108	23 132
Tingkat Pengangguran (TPT)	4,82	2,96	3,31	3,35	3,32

Sumber: Diolah dari Sakernas Agustus 2020

Dalam publikasi ini, pengangguran dikelompokkan menjadi dua kelompok usia, yaitu TPT umur muda dan TPT umur dewasa. Umur muda disini didefinisikan sebagai penduduk usia 15-24 tahun, sedangkan penduduk kelompok umur dewasa adalah penduduk berusia 25 tahun ke atas.

Secara total, TPT penduduk kelompok umur muda pada tahun 2020 mencapai 8,72, lebih tinggi dibandingkan dengan TPT umur dewasa. Dilihat dari wilayahnya, TPT muda di wilayah kota lebih tinggi daripada TPT umur muda di desa. Dirinci menurut jenis kelaminnya, TPT umur muda pada perempuan lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki. TPT kelompok umur dewasa di wilayah perkotaan lebih tinggi dibandingkan di wilayah desa. Menurut jenis kelaminnya, TPT umur dewasa pada laki-laki lebih tinggi dibandingkan dengan TPT umur dewasa perempuan.

Rasio TPT umur muda terhadap TPT umur dewasa secara total sebesar 3,99. Artinya, besar TPT umur muda hampir empat kali lipat TPT umur dewasa. Di sisi lain, *share* penganggur umur muda terhadap total penganggur di Provinsi Sulawesi Barat cukup tinggi. Secara total, *share* penganggur umur muda terhadap total penganggur mencapai 45,61 persen. Artinya, dari 100 penduduk menganggur, 45 orang diantaranya adalah penganggur umur muda (15-24 tahun).



Tabel 3.2
Indikator Pengangguran Umur Muda dan Umur Dewasa
di Provinsi Sulawesi Barat, 2020

Uraian	Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Kota	Desa	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
TPT Umur Muda (15-24 tahun)	10,07	8,40	6,93	12,03	8,72
TPT Umur Dewasa (25 tahun ke atas)	3,76	1,80	2,48	1,74	2,19
Rasio TPT Umur Muda terhadap TPT Dewasa	2,68	4,67	2,79	6,90	3,99
Share Penganggur Umur Muda terhadap Total Penganggur	35,19	49,78	38,83	56,05	45,61

Sumber: Diolah dari Sakernas Agustus 2020

Pembahasan mengenai pengangguran tidak dapat dilepaskan dari tingkat pendidikan penganggur, disamping berkaitan dengan penawaran dan permintaan tenaga kerja. Jika diketahui bahwa orang yang berpendidikan rendah memiliki tingkat pengangguran tinggi maka kebijakan yang mungkin adalah meningkatkan tingkat pendidikan mereka, atau menciptakan lapangan pekerjaan khusus bagi mereka dengan tingkat keterampilan rendah (*low skilled job*). Selanjutnya, apabila diketahui bahwa *share* penganggur berpendidikan tinggi cukup besar maka hal tersebut menunjukkan kurangnya pekerjaan teknis yang membutuhkan keahlian tinggi yang tersedia dalam pasar tenaga kerja. Untuk keperluan analisis, tingkat pendidikan pada pengangguran dikelompokkan menjadi tiga kategori, yaitu:

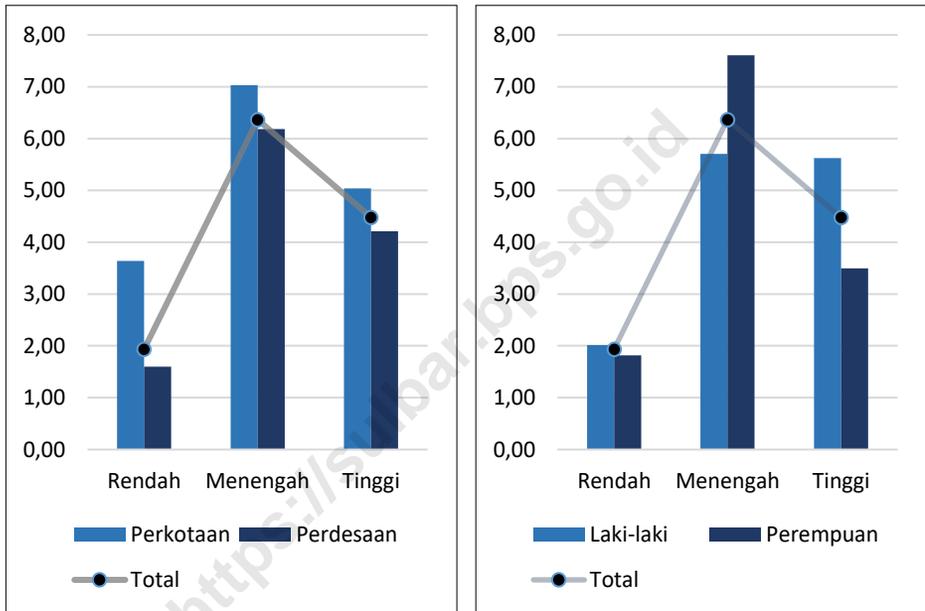
1. Pendidikan rendah, yaitu pekerja yang telah menamatkan pendidikan maksimal pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama atau sederajat. Yang termasuk dalam kategori ini adalah pekerja yang tidak/belum pernah sekolah dan belum tamat sekolah dasar, tamat sekolah dasar atau sederajat, dan tamat sekolah menengah pertama atau sederajat.

2. Pendidikan Menengah yaitu pekerja yang sudah menamatkan pendidikan pada tingkat Sekolah Lanjutan Tingkat Atas atau sederajat. Yang termasuk dalam kategori ini adalah pekerja yang tamat sekolah menengah atas atau sederajat dan sekolah menengah kejuruan.
3. Pendidikan Tinggi yaitu pekerja yang sudah menamatkan pendidikan minimal diploma I. Yang termasuk dalam kategori ini adalah pekerja yang tamat Diploma I/II/III, jenjang strata 1 / diploma IV dan jenjang pendidikan strata 2 atau 3.

Pengangguran diklasifikasikan menurut karakteristik pendidikannya dapat dilihat pada Gambar 3.1. Secara umum, pengangguran di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2020 didominasi oleh pengangguran dengan tingkat pendidikan menengah (SLTA/sederajat). Posisi tertinggi kedua ditempati oleh pengangguran dengan tingkat pendidikan tinggi (perguruan tinggi), dan yang terendah adalah pengangguran dengan tingkat pendidikan rendah (SLTP/sederajat ke bawah). Tingkat pengangguran dengan pendidikan tinggi lebih besar dibandingkan dengan tingkat pengangguran dengan pendidikan rendah. Hal ini disebabkan karena orang dengan pendidikan tinggi lebih selektif dalam memilih jenis pekerjaan yang dianggap sesuai untuk dirinya, sedangkan orang dengan pendidikan rendah umumnya akan bersedia bekerja di sektor manapun asalkan dapat memperoleh pendapatan/penghasilan.

Di wilayah perkotaan, tingkat pengangguran dengan pendidikan menengah merupakan yang tertinggi dibandingkan penganggur dengan pendidikan rendah dan tinggi. Di wilayah perkotaan, pengangguran dengan tingkat pendidikan menengah mencapai 7,03 persen, sedangkan pengangguran dengan tingkat pendidikan rendah 3,64 persen dan tingkat pendidikan tinggi 5,04 persen. Sama halnya dengan wilayah perkotaan, pengangguran di wilayah perdesaan didominasi oleh pengangguran dengan pendidikan menengah (6,18 persen), disusul dengan pengangguran berpendidikan tinggi (4,21 persen) dan pendidikan rendah (1,60 persen). Hal ini menunjukkan bahwa di wilayah perkotaan dan perdesaan masih dibutuhkan lapangan pekerjaan dengan kualifikasi pendidikan menengah, sehingga angkatan kerja dengan pendidikan menengah ini dapat diserap pasar kerja.

Gambar 3.1
Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Menurut Tingkat Pendidikan
di Provinsi Sulawesi Barat, 2020



Sumber: Diolah dari Sakernas Agustus 2020

Pada Gambar 3.1 di sebelah kanan, dapat kita lihat tingkat pengangguran menurut tingkat pendidikan dan jenis kelamin. Berdasarkan jenis kelamin, pola struktur pengangguran pada laki-laki dan perempuan memiliki pola yang sama. Pengangguran pada laki-laki dan perempuan paling banyak didominasi oleh pengangguran dengan tingkat pendidikan menengah, diikuti oleh tingkat pengangguran dengan pendidikan tinggi dan tingkat pengangguran dengan tingkat pendidikan rendah. Tingkat pengangguran laki-laki dengan pendidikan menengah sebesar 5,71 persen dan tingkat pengangguran pada perempuan dengan pendidikan menengah sebesar 7,61 persen.

3.2. Setengah Penganggur

Setengah penganggur (*under employment*) didefinisikan sebagai penduduk yang bekerja dengan jumlah jam kerja dibawah batas jam kerja normal (bekerja kurang dari 35 jam seminggu), dengan kondisi:

1. Mereka dengan sukarela mencari pekerjaan tambahan, meliputi:
 - a) Mereka yang menginginkan pekerjaan lain untuk menambah jam kerjanya dari pekerjaannya sekarang;
 - b) Mereka yang menginginkan mendapat ganti dari pekerjaannya yang sekarang dengan pekerjaan lain yang mempunyai jam kerja lebih banyak.
2. Mereka yang bersedia menerima pekerjaan tambahan.

Tingkat setengah pengangguran dapat menggambarkan kemampuan ekonomi untuk menyediakan lapangan kerja yang mampu memanfaatkan keahlian, pengalaman dan kesediaan bekerja yang dimiliki tenaga kerjanya. Tingkat setengah pengangguran dapat memberikan gambaran tentang kualitas, produktivitas, dan tingkat pemanfaatan lapangan kerja yang tersedia, terutama di negara-negara dengan tingkat pengangguran terbuka rendah.

Gambaran setengah pengangguran di Provinsi Sulawesi Barat pada tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.3. Jumlah total setengah penganggur di Sulawesi Barat pada tahun 2020 adalah 81 ribu orang. Dilihat dari karakteristik daerahnya, setengah penganggur di wilayah desa lebih banyak, mencapai 70 ribu orang. Selain itu, setengah penganggur berjenis kelamin laki-laki sebanyak 52 ribu orang, lebih tinggi dari setengah penganggur perempuan (28 ribu orang). Kontribusi setengah penganggur terhadap total angkatan kerja di Sulawesi barat adalah 11,58 persen. Terhadap total penduduk bekerja, kontribusi setengah pengangguran mencapai 11,98 persen. Meskipun angka setengah pengangguran di desa dan setengah pengangguran pada penduduk laki-laki cukup tinggi, kontribusi setengah pengangguran terhadap total angkatan kerja maupun terhadap total penduduk yang bekerja berada pada kisaran 22 sampai 13 persen.

Tabel 3.3
Indikator Setengah Penganggur di Provinsi Sulawesi Barat, 2020

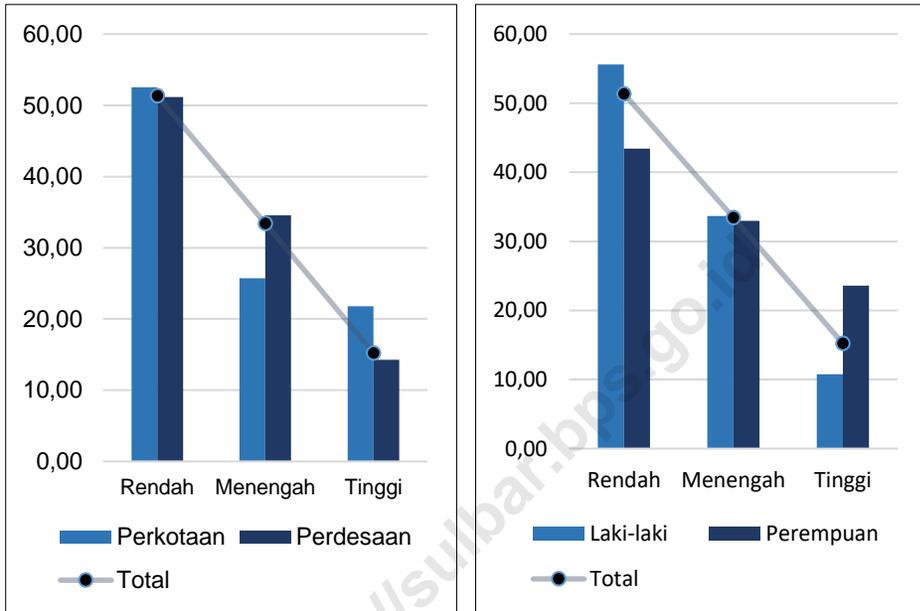
Uraian	Daerah		Jenis Kelamin		Total
	Kota	Desa	Laki-laki	Perempuan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Jumlah Setengah Penganggur	10 484	70 133	52 433	28 184	80 617
Persentase Setengah Penganggur terhadap Total Angkatan Kerja	7,65	12,54	12,37	10,36	11,58
Persentase Setengah Penganggur terhadap Total Penduduk Bekerja	8,04	12,93	12,79	10,71	11,98

Sumber: Diolah dari Sakernas Agustus 2020

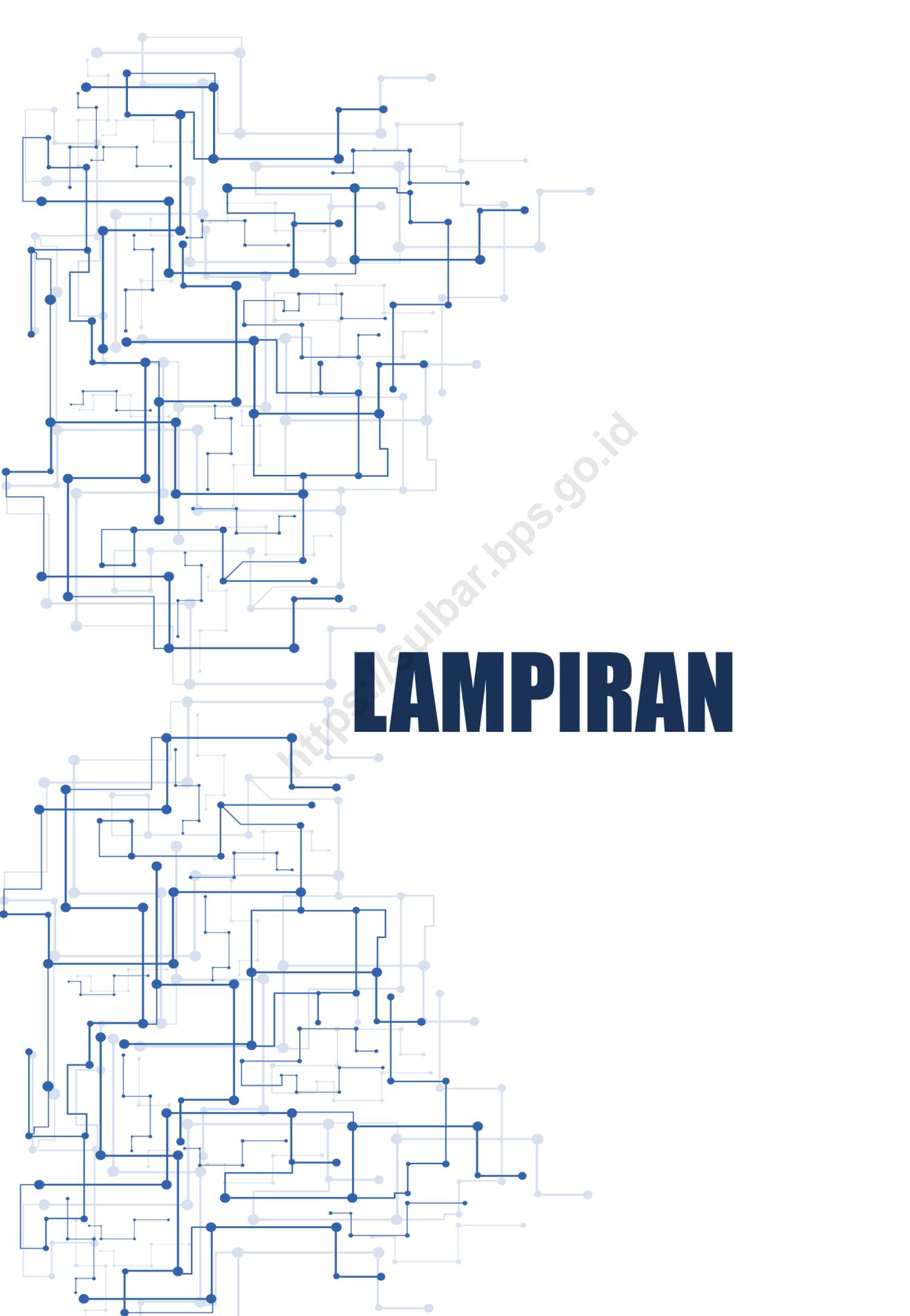
Persentase setengah pengangguran menurut tingkat pendidikan, klasifikasi daerah, dan jenis kelamin dapat dilihat pada Gambar 3.2. Persentase setengah pengangguran semakin kecil seiring dengan tingkat pendidikan yang semakin tinggi. Secara umum, penyumbang *share* setengah penganggur tertinggi adalah kelompok setengah penganggur dengan tingkat pendidikan rendah (51,34 persen), diikuti oleh setengah penganggur dengan tingkat pendidikan menengah (33,42 persen) dan setengah penganggur dengan tingkat pendidikan tinggi (15,24 persen).

Wilayah perkotaan dan perdesaan memiliki pola persentase setengah pengangguran yang sama. Di wilayah perkotaan, *share* setengah penganggur berpendidikan tinggi adalah yang tertinggi dibanding penganggur dengan pendidikan menengah dan rendah, begitu juga di wilayah perdesaan. Berdasarkan jenis kelamin, *share* setengah penganggur pada laki-laki dan perempuan juga memiliki pola yang sama. Setengah penganggur pada kelompok laki-laki dan perempuan paling banyak didominasi oleh setengah penganggur berpendidikan tinggi, kemudian diikuti oleh setengah penganggur berpendidikan menengah dan pendidikan rendah.

Gambar 3.2
Persentase Setengah Penganggur Menurut Tingkat Pendidikan
di Provinsi Sulawesi Barat, 2020



Sumber: Diolah dari Sakernas Agustus 2020



<https://sulbar.bps.go.id>

LAMPIRAN

TABEL 1A
Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas
Menurut Jenis Kegiatan di Provinsi Sulawesi Barat, 2020

Kegiatan	Kota	Desa	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bekerja	130 418	542 568	409 932	263 054	672 986
Pengangguran Terbuka	6 610	16 522	14 024	9 108	23 132
Sekolah	14 406	46251	26 373	34 284	60 657
Mengurus Rumah Tangga	44 678	154906	25 679	173 905	199 584
Lainnya	7 310	28054	21 041	14 323	35 364
Jumlah	203 422	788 301	497 049	494 674	991 723

Sumber: Diolah dari Sakernas Agustus 2020



Tabel 1B
 Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas
 Menurut Jenis Kegiatan di Provinsi Sulawesi Barat, 2019 – 2020

Kegiatan	2019		2020	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Bekerja	660 257	641 613	656 377	672 986
Pengangguran Terbuka	9 682	21 054	17 598	23 132
Sekolah	79 175	71 383	80 198	60 657
Mengurus Rumah Tangga	166 068	189 554	185 127	199 584
Lainnya	32 589	33 043	27 682	35 364
Jumlah	947 771	956 647	966 982	991 723

Sumber: Diolah dari Sakernas 2019 - 2020



Tabel 2A
 Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas
 Menurut Kelompok Umur di Provinsi Sulawesi Barat, 2020

Kelompok Umur	Kota	Desa	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15-24	50 478	187 535	118 510	119 503	238 013
25-34	42 182	175 531	110 448	107 265	217 713
35-54	75 349	295 569	189 026	181 892	370 918
55-64	19 923	76 308	47 512	48 719	96 231
65+	15 490	53 358	31 553	37 295	68 848
Jumlah	203 422	788 301	497 049	494 674	991 723

Sumber: Diolah dari Sakernas Agustus 2020



Tabel 2B
 Jumlah Penduduk Umur 15 Tahun ke Atas
 Menurut Kelompok Umur di Provinsi Sulawesi Barat, 2019 – 2020

Kelompok Umur	2019		2020	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
	(1)	(2)	(3)	(4)
15-24	252 174	252 907	254 503	238 013
25-34	214 219	215 355	217 146	217 713
35-54	343 043	348 485	351 664	370 918
55-64	80 090	81 528	83 630	96 231
65+	58 245	58 372	60 039	68 848
Jumlah	947 771	956 647	966 982	991 723

Sumber: Diolah dari Sakernas 2019 – 2020

Tabel 3A
 Jumlah Angkatan Kerja Umur 15 Tahun ke Atas
 Menurut Kelompok Umur di Provinsi Sulawesi Barat, 2020

Kelompok Umur	Kota	Desa	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15-24	23 089	97 890	78 531	42 448	120 979
25-34	33 609	131 528	104 071	61 066	165 137
35-54	61 347	244 540	178 369	127 518	305 887
55-64	13 454	57 624	42 140	28 938	71 078
65+	5 529	27 508	20 845	12 192	33 037
Jumlah	137 028	559 090	423 956	272 162	696 118

Sumber: Diolah dari Sakernas Agustus 2020



Tabel 3B
 Jumlah Angkatan Kerja Umur 15 Tahun ke Atas
 Menurut Kelompok Umur di Provinsi Sulawesi Barat, 2019 – 2020

Kelompok Umur	2019		2020	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
	(1)	(2)	(4)	(5)
15-24	124 777	126 580	127 568	120 979
25-34	173 384	165 123	168 731	165 137
35-54	292 312	284 454	289 591	305 887
55-64	56 564	60 841	61 862	71 078
65+	22 902	25 669	26 223	33 037
Jumlah	669 939	662 667	673 975	696 118

Sumber: Diolah dari Sakernas 2019 – 2020

Tabel 4A
 Jumlah Angkatan Kerja Umur 15 Tahun ke Atas
 Menurut Jenis Kegiatan di Provinsi Sulawesi Barat, 2020

Kegiatan	Kota	Desa	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Bekerja Penuh	71 921	217 465	199 549	89 837	289 386
Bekerja Paruh Waktu	42 224	231 733	141 578	132 379	273 957
Setengah Pengangguran	10 484	70 133	52 433	28 184	80 617
Pengangguran Terbuka	6 610	16 522	14 024	9 108	23 132
Jumlah	131 239	535 853	407 584	259 508	667 092

Sumber: Diolah dari Sakernas Agustus 2020



Tabel 4B
 Jumlah Angkatan Kerja Umur 15 Tahun ke Atas
 Menurut Jenis Kegiatan di Provinsi Sulawesi Barat, 2019 – 2020

Jenis Kegiatan	2019		2020	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
	(1)	(2)	(3)	(4)
Bekerja Penuh	362 198	342 530	312 006	289 386
Bekerja Paruh Waktu	245 605	233 585	227 453	273 957
Setengah Pengangguran	52 454	65 498	100 210	80 617
Pengangguran Terbuka	9 682	21 054	17 598	23 132
Jumlah	669 939	662 667	657 267	667 092

Sumber: Diolah dari Sakernas 2019 – 2020



Tabel 5A
 Jumlah Pekerja Umur 15 Tahun ke Atas
 Menurut Lapangan Pekerjaan/Usaha Utama di Provinsi Sulawesi Barat, 2020

Lapangan Pekerjaan/Usaha Utama (1)	Kota (2)	Desa (3)	Laki-laki (4)	Perempuan (5)	Total (6)
Pertanian	25 870	311 900	233 312	104 458	337 770
Industri Pengolahan	12 576	38 855	25 429	26 002	51 431
Bangunan	10 029	25 413	35 271	171	35 442
Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi	41 367	73 754	41 055	74 066	115 121
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	31 485	66 650	44 154	53 981	98 135
Lainnya	9 091	25 996	30 711	4 376	35 087
Jumlah	130 418	542 568	409 932	263 054	672 986

Sumber: Diolah dari Sakernas Agustus 2020



Tabel 5B
 Jumlah Pekerja Umur 15 Tahun ke Atas Menurut
 Lapangan Pekerjaan/Usaha Utama di Provinsi Sulawesi Barat, 2019 – 2020

Lapangan Pekerjaan/Usaha Utama (1)	2019		2020	
	Februari (2)	Agustus (3)	Februari (4)	Agustus (5)
Pertanian	321 365	297 366	298 153	337 770
Industri Pengolahan	33 392	54 782	40 392	51 431
Bangunan	29 740	36 887	35 489	35 442
Perdagangan, Rumah Makan, dan Jasa Akomodasi	131 704	117 063	142 546	115 121
Jasa Kemasyarakatan, Sosial, dan Perorangan	102 991	96 867	101 927	98 135
Lainnya	41 065	38 648	37 870	35 087
Jumlah	660 257	641 613	656377	672986

Sumber: Diolah dari Sakernas 2019 – 2020

Tabel 6A
 Jumlah Pekerja Umur 15 Tahun ke Atas
 Menurut Status Pekerjaan/Usaha Utama di Provinsi Sulawesi Barat, 2020

Status Pekerjaan/Usaha Utama	Kota	Desa	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Berusaha Sendiri	33 225	105 790	91 308	47 707	139 015
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Pekerja Tidak Dibayar	20 515	139 375	112 223	47 667	159 890
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Karyawan	3 222	11 365	12 433	2 154	14 587
Buruh/Karyawan/Pegawai	46 419	123 196	106 554	63 061	169 615
Pekerja Bebas di Pertanian	232	21 048	16 772	4 508	21 280
Pekerja Bebas di Non Pertanian	7 337	16 895	21 271	2 961	24 232
Pekerja Tidak Dibayar/Pekerja Keluarga	19 468	124 899	49 371	94 996	144 367
Jumlah	130 418	542 568	409 932	263 054	672 986

Sumber: Diolah dari Sakernas Agustus 2020



Tabel 6B
Jumlah Pekerja Umur 15 Tahun ke Atas Menurut
Status Pekerjaan/Usaha Utama di Provinsi Sulawesi Barat, 2019 – 2020

Status Pekerjaan/Usaha Utama	2019		2020	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
	(1)	(2)	(3)	(4)
Berusaha Sendiri	121 817	135 386	134 695	139 015
Berusaha Dibantu Buruh Tidak Tetap/Pekerja Tidak Dibayar	169 097	147 932	178 205	159 890
Berusaha Dibantu Buruh Tetap/Karyawan	9 614	11 892	8 838	14 587
Buruh/Karyawan/Pegawai	179 060	170 901	170 809	169 615
Pekerja Bebas di Pertanian	17 801	26 629	18 300	21 280
Pekerja Bebas di Non Pertanian	19 924	27 161	14 496	24 232
Pekerja Tidak Dibayar/Pekerja Keluarga	142 944	121 712	131 034	144 367
Jumlah	660 257	641 613	656 377	672 986

Sumber: Diolah dari Sakernas 2019 – 2020

Tabel 7A
 Jumlah Pekerja Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Jam Kerja
 Selama Seminggu yang Lalu di Provinsi Sulawesi Barat, 2020

Jam Kerja	Kota	Desa	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
0*)	5789	23237	16372	12654	29 026
1-7	6306	39024	15724	29606	45 330
8-14	12754	72416	39917	45253	85 170
15-24	17692	102519	66404	53807	120 211
25-34	15956	87907	71966	31897	103 863
35+	71 921	217 465	199 549	89 837	289 386
Jumlah	130 418	542 568	409 932	263 054	672 986

Keterangan: *) Sementara tidak bekerja

Sumber: Diolah dari Sakernas Agustus 2020



Tabel 7B
 Jumlah Pekerja Umur 15 Tahun ke Atas Menurut Jam Kerja
 Selama Seminggu yang Lalu di Provinsi Sulawesi Barat, 2019 – 2020

Jam Kerja	2019		2020	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
	(1)	(2)	(3)	(4)
0*)	22 171	30 919	16 708	29 026
1-7	31 893	31 333	38 760	45 330
8-14	66 451	59 404	64 874	85 170
15-24	85 180	107 252	115 300	120 211
25-34	114 535	101 094	108 729	103 863
35+	340 027	311 611	312 006	289 386
Jumlah	660 257	641 613	656 377	672 986

Sumber: Diolah dari Sakernas 2019 – 2020

Tabel 8A
 Jumlah Pekerja Umur 15 Tahun ke Atas
 Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat, 2020

Tingkat Pendidikan	Kota	Desa	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tamat SD ke bawah	50 499	279 142	203 972	125 669	329 641
SMP Sederajat	19 954	84 022	64 898	39 078	103 976
Sekolah Menengah Umum	23 723	81 710	69 950	35 483	105 433
Sekolah Menengah Kejuruan	10 385	42 516	34 174	18 727	52 901
Diploman I/ II/ III	2 918	9 177	3 859	8 236	12 095
Strata I ke atas	22 939	46 001	33 079	35 861	68 940
Jumlah	130 418	542 568	409 932	263 054	672 986

Sumber: Diolah dari Sakernas Agustus 2020



Tabel 8B
 Jumlah Pekerja Umur 15 Tahun ke Atas
 Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat, 2019 – 2020

Tingkat Pendidikan	2019		2020	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
	(1)	(2)	(3)	(4)
Tamat SD ke bawah	322 201	317 862	315 393	329 641
SMP Sederajat	99 712	88 641	97 038	103 976
Sekolah Menengah Umum	106 122	105 140	100 642	105 433
Sekolah Menengah Kejuruan	50 354	51 774	49 800	52 901
Diploman I/ II/ III	12 215	12 476	12 840	12 095
Strata I ke atas	69 653	65 720	80 664	68 940
Jumlah	660 257	641 613	656 377	672 986

Sumber: Diolah dari Sakernas 2019 – 2020

Tabel 9A
 Jumlah Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka
 Menurut Kelompok Umur di Provinsi Sulawesi Barat, 2020

Tingkat Pendidikan	Kota	Desa	Laki-laki	Perempuan	Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angkatan Kerja					
15-24	23 089	97 890	78 531	42 448	120 979
25+	113 939	461 200	345 425	229 714	575 139
Pengangguran Terbuka					
15-24	2 326	8 225	5 446	5 105	10 551
25+	4 284	8 297	8 578	4 003	12 581

Sumber: Diolah dari Sakernas Agustus 2020



Tabel 9B
 Jumlah Angkatan Kerja dan Pengangguran Terbuka
 Menurut Kelompok Umur di Provinsi Sulawesi Barat, 2019 – 2020

Uraian (1)	2019		2020	
	Februari (2)	Agustus (3)	Februari (4)	Agustus (5)
Angkatan Kerja				
15-24	124 777	126 580	127 568	120 979
25+	545 162	536 087	546 407	575 139
Pengangguran Terbuka				
15-24	6 289	12 180	11 980	10 551
25+	3 393	8 874	5 618	12 581

Sumber: Diolah dari Sakernas 2019 – 2020

Tabel 10A
 Jumlah Pengangguran Terbuka Umur 15 Tahun ke Atas
 Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat, 2020

Uraian (1)	Kota (2)	Desa (3)	Laki-laki (4)	Perempuan (5)	Total (6)
Tamat SMP ke Bawah	2 659	5 909	5 523	3 045	8 568
SMU atau Sederajat	2 579	8 186	6 300	4 465	10 765
Perguruan Tinggi	1 372	2 427	2 201	1 598	3 799
Jumlah	6 610	16 522	14 024	9 108	23 132

Sumber: Diolah dari Sakernas Agustus 2020



Tabel 10B
 Jumlah Pengangguran Terbuka Umur 15 Tahun ke Atas
 Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Sulawesi Barat, 2019 – 2020

Uraian	2019		2020	
	Februari	Agustus	Februari	Agustus
	(1)	(2)	(3)	(4)
Tamat SMP ke Bawah	3 639	5 764	3 387	8 568
SMU atau Sederajat	4 869	11 123	9 901	10 765
Perguruan Tinggi	1 174	4 167	4 310	3 799
Jumlah	9 682	21 054	17 598	23 132

Sumber: Diolah dari Sakernas 2019 – 2020



Sensus
Penduduk
2020

DATA

MENCERDASKAN BANGSA



**BADAN PUSAT STATISTIK
PROVINSI SULAWESI BARAT**

Jl. RE. Martadinata No. 10 Mamuju
Tlp. (0826) 21265 Fax. (0426) 22103
Email: sulbar@bps.go.id
Homepage: <http://sulbar.bps.go.id>

ISSN 2655-0334



9 772655 033405